

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS Perubahan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah Rancangan Program Prioritas dan Patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD. PPAS merupakan dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJP, RPJM, RKPD dan KUA. PPAS merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan Daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu Tahun Anggaran yang disusun berdasarkan KUA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan PPAS Perubahan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Tarakan Tahun 2023 disusun dengan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 496);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ANggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4)
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11)
33. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 4)
35. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);
36. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40);
37. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 72);
38. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
39. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Perubahan target Pendapatan Daerah dalam Kebijakan umum APBD Perubahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023, diarahkan pada Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Prinsip penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilakukan secara terukur dengan memperhitungkan potensi maupun *trend* realisasi PAD pada tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Pemungutan dan penyetoran pendapatan asli daerah diupayakan tidak memberatkan para wajib pajak, baik masyarakat maupun dunia usaha serta tetap berada pada koridor peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Upaya-upaya dimaksud ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan serta penyetoran pajak dan retribusi daerah baik secara aplikasi *e-mobile* perbankan maupun lewat *e-commerce*, melakukan penyuluhan yang humanis dan berkelanjutan, pemuktahiran data wajib pajak yang aktif dan tidak aktif, pengendalian dan pengawasan yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Prinsip penetapan target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dialokasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada APBD Perubahan 2023 dialokasikan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44 /K.75/2023 tentang Alokasi Sementara Belanja Bagi hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara kepada Kabupaten/Kota Tahun

Anggaran 2023 dan Kurang Salur DBH Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.102/2023 tentang Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

Disisi lain, Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat juga mengalami perubahan dengan adanya Transfer Non Tunai DBH Tahun 2022 yang ditransfer pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.07/2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022.

Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara juga terdapat Penerimaan yang pada saat APBD murni belum teralokasi dan dilakukan Perubahan Perwali Penjabaran serta telah diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya dialokasikan pada rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.6/2023 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.16/2023 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.178/2023 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH /(BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.085.771.438.640,00	1.186.242.440.729,26	100.471.002.089,26
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	160.749.021.080,00	186.956.236.076,26	26.207.214.996,26
4.1.1	Pajak Daerah	80.985.640.040,00	90.911.161.903,00	9.925.521.863,00
4.1.2	Retribusi Daerah	20.842.529.000,00	21.476.389.000,00	633.860.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.845.737.735,00	16.203.957.872,00	4.358.220.137,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	47.075.114.305,00	58.364.727.301,26	11.289.612.996,26
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	921.758.417.560,00	995.831.404.653,00	74.072.987.093,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	828.316.304.213,00	851.936.990.764,00	23.620.686.551,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	810.657.739.213,00	834.278.425.764,00	23.620.686.551,00
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	688.187.127.213,00	711.807.813.764,00	23.620.686.551,00
4.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	249.266.429.213,00	272.887.115.764,00	23.620.686.551,00
4.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	438.920.698.000,00	438.920.698.000,00	-
4.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	122.470.612.000,00	122.470.612.000,00	-
4.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	29.024.829.000,00	29.024.829.000,00	-
4.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	93.445.783.000,00	93.445.783.000,00	-
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	17.658.565.000,00	17.658.565.000,00	-
4.2.2	Transfer Antar-Daerah	93.442.113.347,00	143.894.413.889,00	50.452.300.542,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	73.717.713.347,00	94.654.187.135,00	20.936.473.788,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	19.724.400.000,00	49.240.226.754,00	29.515.826.754,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.264.000.000,00	3.454.800.000,00	190.800.000,00
4.3.1	Hibah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-
4.3.2	Dana Darurat	-	-	-
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	264.000.000,00	454.800.000,00	190.800.000,00

Untuk itu beberapa kebijakan bidang pendapatan yang telah ditetapkan dalam penyusunan P-APBD 2023 tetap terus dilaksanakan dengan beberapa revisi guna menyesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi.

Beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan di sisa tahun anggaran 2023 dalam rangka pencapaian target pendapatan antara lain:

- a. Meningkatkan sistem pengawasan pelaporan atas pembayaran pajak melalui teknologi Informasi (*Payment Control Sistem*).
- b. Meningkatkan pengawasan pengendalian serta penertiban secara terintegrasi terhadap seluruh perijinan usaha.
- c. Melakukan intensifikasi pemungutan serta ekstensifikasi objek-objek pajak dengan cara pendataan OP/WP baru yang belum terdata.
- d. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap unit-unit usaha Perusda yang menghasilkan PAD, khususnya terhadap perjanjian kerja sama yang telah berakhir masa berlakunya.
- e. Melakukan Penerapan sanksi yang tegas terhadap wajib Pajak dan retribusi yang melanggar Perda.
- f. Meningkatkan pengawasan DPRD secara berkala melalui *public hearing* terhadap SKPD yang realisasi penerimaannya tidak mencapai target.
- g. Penghapusan Piutang pajak yang sudah Kadaluarsa.
- h. Komunikasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan dalam peningkatan dana transfer termasuk Insentif Fiskal yang dialokasi setiap triwulan.
- i. Mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk melaksanakan rapat rekonsiliasi Dana Bagi Hasil Provinsi minimal per semester setiap tahun agar Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi upaya peningkatan Pajak Daerah Provinsi.

Meskipun intensifikasi dan ekstensifikasi terus diupayakan, namun prinsip pemungutan tetap tidak memberatkan masyarakat/dunia usaha. Upaya tersebut ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan penyuluhan, akurasi data, penghapusan terhadap piutang pajak kadaluarsa, pengendalian dan pengawasan yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Penetapan target Pendapatan Daerah dalam Kebijakan umum APBD Perubahan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2023, diarahkan pada upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang akan terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja akan di Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Nasional Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

- 1) Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.
 - a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan, antara lain:
 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan.
 - a) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
 - c) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
 - d) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan.
 - a) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - b) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
 - c) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
 - d) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

- e) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.
 - a) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - b) Program Pemasaran Pariwisata.
- 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
 - a) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
 - b) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.
 - c) Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
 - d) Program perizinan usaha pertanian.
 - e) Program Penyuluhan Pertanian
- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.
 - Program perencanaan dan pembangunan industri
- 6. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - a) Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
 - b) Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
 - c) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM).
 - d) Program pengembangan UMKM.
 - e) Program perizinan dan pendaftaran perusahaan.
 - f) Program peningkatan sarana distribusi perdagangan.
 - g) Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
 - h) Program pengembangan ekspor.

- i) Program standardisasi dan perlindungan konsumen.
- j) Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.
- 7. Urusan pemerintahan bidang penanaman modal
 - a) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
 - b) Program pengembangan iklim penanaman modal.
 - c) Program promosi penanaman modal

Tabel 3.1
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Peningkatan skor pola pangan harapan		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Peningkatan Skor PPH		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Persentase ketersediaan dan kebutuhan terhadap bahan pangan penyumbang inflasi		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Persentase Penanganan daerah rawan pangan		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Koperasi aktif dan patuh		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase pertumbuhan UMKM		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase usaha mikro yang naik kelas		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase jumlah dokumen kebijakan yang tersusun		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Persentase kegiatan Promosi Penanaman Modal		
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
			Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Persentase Peningkatan Produksi perikanan budidaya		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
			Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Persentase pemasaran produk perikanan		
				Dinas Perikanan	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Persentase Terlaksananya pemasaran pariwisata		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			Produktivitas Hasil Peternakan (daging)		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
			Persentase peningkatan produksi pertanian		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
			Cakupan Surat Rekomendasi Izin Usaha yang Diterbitkan		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Rata-rata pendapatan petani miskin per kapita selama setahun		
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Nilai Ekspor Kota Tarakan		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase UTTP Tertera bertanda sah		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase peningkatan jenis produk lokal Kota Tarakan yang dipasarkan		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Kelulusan SD/MI		
				Dinas Pendidikan	
			Angka Kelulusan SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan	
			Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Muni SD/MI		
				Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Murni PAUD		
				Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan	
			Angka putus sekolah SD/MI		
				Dinas Pendidikan	
			Angka putus sekolah SMP/MTs		
				Dinas Pendidikan	
			Rasio siswa per kelas PAUD		
				Dinas Pendidikan	
			Rasio siswa per kelas SD		
				Dinas Pendidikan	
			Rasio siswa per kelas SMP		
				Dinas Pendidikan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Rasio siswa per rombongan belajar SD		
				Dinas Pendidikan	
			Rasio siswa per rombongan belajar SMP		
				Dinas Pendidikan	
			siswa usia 7-13 tahun yang memperoleh pendidikan SD/MI		
				Dinas Pendidikan	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Angka Kematian Balita		
				Dinas Kesehatan	
			Angka Kematian Bayi		
				Dinas Kesehatan	
			Angka Kematian Ibu Melahirkan		
				Dinas Kesehatan	
			Pelayanan kesehatan balita		
				Dinas Kesehatan	
			Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
				Dinas Kesehatan	
			Pelayanan kesehatan ibu hamil		
				Dinas Kesehatan	
			Pelayanan kesehatan ibu melahirkan		
				Dinas Kesehatan	
			Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat		
				Dinas Kesehatan	
			Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV)		
				Dinas Kesehatan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis		
				Dinas Kesehatan	
			Pelayanan kesehatan pada usia lansia		
				Dinas Kesehatan	
			Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		
				Dinas Kesehatan	
			Pelayanan kesehatan pada usia produktif		
				Dinas Kesehatan	
			Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus		
				Dinas Kesehatan	
			Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita		
				Dinas Kesehatan	
			Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase SDM Kesehatan yang memiliki		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			kompetensi sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
			Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial		
				Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase pencari kerja yang kompeten		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Persentase tenaga kerja yang terserap		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Persentase pemenuhan indikator KLA		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
			Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase keluarga yang terdata		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Berencana	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Cakupan aseptor KB aktif		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			pesentase Kontrasepsi MKJP		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Unmeet need		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian		
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Terpenuhi		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Persentase Pemuda yang difasilitasi untuk mengikuti kegiatan Kepemudaan		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Persentase cabor yang mempunyai manajemen yang baik		
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Terpenuhi		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi		
				Kecamatan Tarakan Utara	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan				
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			Persentase pengelolaan Arsip		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Persentase layanan kepegawaian daerah		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			Prosentase capaian kinerja penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
			Persentase capaian kinerja Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Rasio siswa per kelas PAUD		
				Dinas Pendidikan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			volume tampungan air baku		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%)		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
			Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
			Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase menurunnya kawasan kumuh		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan		
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi		
				Kecamatan Tarakan Timur	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim				
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
			Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		
				Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase Perusahaan yang mendapatkan minimal level biru		
				Dinas Lingkungan Hidup	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			prosentase sampah yang dikelola		
				Dinas Lingkungan Hidup	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		
				Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi		
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
				Dinas Lingkungan Hidup	
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
				Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
			Indeks Reformasi dan Birokrasi		
				Sekretariat Daerah	
			Nilai IKM		
				Sekretariat Daerah	
			Nilai SAKIP		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Pelayanan Prokopim		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase Rekomendasi LHP yang ditindak Lanjuti		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
			Nilai LPPD		
				Sekretariat Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Penilaian Kota Peduli HAM dan RANHAM		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase realisasi penyusunan Perda		
				Sekretariat Daerah	
			Persentase SPM		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Prosentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
			Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi		
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Persentase implementasi rencana kelitbangan		
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal		
				Inspektorat	
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			Prosentase partai politik yang berperan dalam pembangunan nasional		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Prosentase ormas yang aktif		
				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

- 2) Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023.

Tabel 3.2
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
74	Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
			Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.946.825.706	71.157.293.843
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
			jumlah titik daerah potensi dan rawan laka			
				Dinas Perhubungan	5.492.967.354	5.492.967.354
			Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan			
				Dinas Perhubungan	5.492.967.354	5.492.967.354
			Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Perhubungan	5.492.967.354	5.492.967.354
			Titik Kemacetan yang teratasi			
				Dinas Perhubungan	5.492.967.354	5.492.967.354
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				
			Persentase Pemeliharaan Pelabuhan			
				Dinas Perhubungan	70.000.000	70.000.000
75	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota					
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				
			Volume tampungan air baku (meter3)			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.000.000.000	3.000.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				
			Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%)			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.901.400.000	1.901.400.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
			Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.070.061.405	34.984.298.800
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
			Persentase Luas Genangan Banjir (%)			
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.473.773.270	19.638.773.270
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
			Persentase lingkungan pemukiman kumuh			
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	254.999.860	254.999.860
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				
			Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni			

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			untuk MBR			
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.000.000.060	1.100.000.060
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				
			Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan			
				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	31.157.753.700	42.967.088.039
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
			Persentase sampah yang dikelola			
				Dinas Lingkungan Hidup	591.509.360	1.091.509.360
76	Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komperatif setiap kabupaten/kota					
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
			Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan			
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	9.997.840	9.997.840
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
			Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota			
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	50.996.300	50.996.300
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
			Nilai Ekspor Kota Tarakan			
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	29.999.880	29.999.880
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
			Persentase peningkatan daya saing IKM yang			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			difasilitasi			
				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	199.998.740	199.998.740
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
			Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak			
				Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	334.012.750	524.637.750
77	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan Kebangsaan					
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
			Angka putus sekolah SD/MI			
				Dinas Pendidikan	700.000.000	700.000.000
			Angka putus sekolah SMP/MTs			
				Dinas Pendidikan	700.000.000	700.000.000
			Rasio siswa per kelas PAUD			
				Dinas Pendidikan	700.000.000	700.000.000
			Rasio siswa per kelas SD			
				Dinas Pendidikan	700.000.000	700.000.000
			Rasio siswa per kelas SMP			
				Dinas Pendidikan	700.000.000	700.000.000
			Rasio siswa per rombongan belajar SD			
				Dinas Pendidikan	700.000.000	700.000.000
			Rasio siswa per rombongan belajar SMP			
				Dinas Pendidikan	700.000.000	700.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi			
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.502.713.978	3.502.713.978

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
79	Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di kabupaten/kota					
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
			Persentase Koperasi aktif dan patuh			
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	9.999.880	9.999.880
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
			Persentase pertumbuhan UMKM			
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	339.999.290	339.999.290
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
			Persentase usaha mikro yg naik kelas			
				Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	50.000.000	50.000.000
80	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Dengan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas Dan Memberi Jaminan Perlindungan Kepada Petani Tambak Melalui Mekanisme Pengadaan Fasilitas Dan Regulasi Disetiap Kabupaten/Kota.					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	343.058.570	343.058.570
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				
			Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.000.380	10.000.380
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
			Peningkatan skor Pola Pangan Harapan			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	114.995.172	114.995.172

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Terhadap Bahan Pangan Penyumbang Inflasi			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	114.995.172	114.995.172
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				
			Persentase Penanganan daerah rawan pangan			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	39.996.000	39.996.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				
			persentase keamanan pangan yang dilaksanakan			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.999.000	19.999.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi			
				Dinas Perikanan	9.325.628.848	9.325.628.848
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
			Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap			
				Dinas Perikanan	469.896.120	656.632.120
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya			
				Dinas Perikanan	134.934.972	134.934.972
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
			Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan			
				Dinas Perikanan	12.938.000	12.938.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
			Persentase pemasaran produk perikanan			
				Dinas Perikanan	149.079.140	149.079.140
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
			Produktivitas Hasil Pertanian			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	607.927.476	607.927.476
			Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)			

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH PERUBAHAN

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	607.927.476	607.927.476
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				
			Persentase peningkatan produksi pertanian			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	850.171.730	850.171.730
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
			Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	268.954.485	268.954.485
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				
			Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.582.000	7.582.000
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
			Rata-rata pendapatan petani miskin per kapita selama setahun (dalam Jutaan)			
				Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	587.503.016	587.503.016

3) Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah; dan

Tabel 3.3
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan							
		01. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.						

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar				
					Dinas Kesehatan	903.264.010	903.264.010	
2	Peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat							
		01. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan				
					Dinas Kesehatan	2.299.660.890	2.299.660.890	
3	Pemenuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman							
		01. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.						
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan				
					Dinas Kesehatan	472.342.000	472.342.000	
4	Peningkatan kualitas tenaga kerja							
		13. Menurunnya pengangguran.						
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase pencari kerja yang kompeten				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	179.995.225	179.995.225	
5	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat							
		06. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.						

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Kategori kelurahan				
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	24.984.770	24.984.770	
6	Perbaikan Layanan Dasar Masyarakat Miskin Yang Tepat Sasaran							
		12. Menurunnya kemiskinan.						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					
				Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial				
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	9.956.880	9.956.880	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				Persentase Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis Terlantar di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya				
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	189.072.824	189.072.824	

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani				
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	85.487.100	85.487.100	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial				
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000	50.000.000	
7	Perluasan kesempatan kerja							
		13. Menurunnya pengangguran.						
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase tenaga kerja yang terserap				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	112.469.130	112.469.130	
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	107.803.660	107.803.660	
8	Pengembangan dan Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas							
		04. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.918.406.632	11.918.406.632	
					Dinas Perikanan	9.325.628.848	9.325.628.848	
		14. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi				
					Dinas Perikanan	23.314.072.120	23.314.072.120	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				Persentase Peningkatan Produksi perikanan tangkap				
					Dinas Perikanan	2.349.480.600	2.536.216.600	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya				
					Dinas Perikanan	674.674.860	674.674.860	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					
				Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan				
					Dinas Perikanan	64.690.000	64.690.000	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				Persentase pemasaran produk perikanan				
					Dinas Perikanan	745.395.700	745.395.700	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				Produktivitas Hasil Pertanian				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.989.471.880	2.989.471.880	
				Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.989.471.880	2.989.471.880	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Persentase peningkatan produksi pertanian				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.250.858.650	4.250.858.650	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Cakupan waktu pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.344.772.425	1.344.772.425	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					
				Cakupan surat rekomendasi izin usaha yang diterbitkan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	37.910.000	37.910.000	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				Rata-rata pendapatan petani miskin per kapita selama setahun (dalam Jutaan)				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.937.515.080	2.937.515.080	
		15. Terkendalnya inflasi daerah.						
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase ketersediaan sarana pendukung kemandirian pangan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.000.380	10.000.380	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Peningkatan skor Pola Pangan Harapan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	114.995.172	114.995.172	
				Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Terhadap Bahan Pangan Penyumbang Inflasi				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	114.995.172	114.995.172	
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Persentase Penanganan daerah rawan pangan				
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	39.996.000	39.996.000	
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				persentase keamanan pangan yang dilaksanakan				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.999.000	19.999.000	

			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
			Produktivitas Hasil Pertanian					
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.033.100	10.033.100	
			Produktivitas Hasil Peternakan (Daging)					
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	10.033.100	10.033.100	
9	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan							
		01. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.						
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
			Angka Kematian Balita					
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
			Angka Kematian Bayi					
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
			Angka Kematian Ibu Melahirkan					

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Pelayanan kesehatan balita				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Pelayanan kesehatan ibu hamil				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Pelayanan kesehatan ibu melahirkan				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV)				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pelayanan kesehatan pada usia lansia				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Pelayanan kesehatan pada usia produktif				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Pelayanan kesehatan penderita hipertensi				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
				Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk				
					Dinas Kesehatan	27.307.248.450	30.035.048.000	
10	Peningkatan Perdagangan Barang dan Jasa Berbasis Sumber Daya Lokal							
		14. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah						
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
			Persentase peningkatan SKA yang diterbitkan					
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	49.989.200	49.989.200	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
			Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	99.951.050	99.951.050	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
			Nilai Ekspor Kota Tarakan					

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	149.999.400	149.999.400	
11	Peningkatan Kemudahan Investasi							
		14. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah						
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Persentase peningkatan rencana investasi Kota Tarakan				
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	125.000.000	125.000.000	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Nilai IKM (Unsur Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu)				
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	995.525.000	1.008.075.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Nilai realisasi investasi Kota Tarakan (dalam milyar rupiah)				
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.858.255.000	1.858.255.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	86.250.000	86.250.000	
12	Pengendalian Inflasi							
		14. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah						
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	254.981.500	254.981.500	
13	Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana							
		01. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.						
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	313.684.813	313.684.813	
				Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	313.684.813	313.684.813	
				Persentase keluarga yang terdata				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	313.684.813	313.684.813	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.833.891.330	1.959.370.242	
				Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.833.891.330	1.833.891.330	
				Unmeet need				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.833.891.330	1.833.891.330	
		03. Meningkatnya daya beli masyarakat.						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Persentase Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Yang Dibina				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	948.096.071	948.096.071	

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		04. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.005.427.956	7.005.427.956	
14	Optimalisasi Pendidikan Dasar							
		02. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan						
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka putus sekolah SD/MI				
					Dinas Pendidikan	4.200.000.000	4.200.000.000	
				Angka putus sekolah SMP/MTs				
					Dinas Pendidikan	4.200.000.000	4.200.000.000	
				Rasio siswa per kelas PAUD				
					Dinas Pendidikan	4.200.000.000	4.200.000.000	
				Rasio siswa per kelas SD				
					Dinas Pendidikan	4.200.000.000	4.200.000.000	
				Rasio siswa per kelas SMP				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pendidikan	4.200.000.000	4.200.000.000	
				Rasio siswa per rombongan belajar SD				
					Dinas Pendidikan	4.200.000.000	4.200.000.000	
				Rasio siswa per rombongan belajar SMP				
					Dinas Pendidikan	4.200.000.000	4.200.000.000	
15	Pengembangan Minat Baca Masyarakat							

			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
			Persentase Penunjang Perpustakaan					
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39.871.764	39.871.764	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
			Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan					
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.996.577	9.996.577	
16	Peningkatan Kesempatan dan Kemudahan Usaha Mikro							
		03. Meningkatnya daya beli masyarakat.						
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					
			Persentase KSP/ USP yang berizin					

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	19.265.160	19.265.160	
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase Koperasi aktif dan patuh				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	9.999.880	9.999.880	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Persentase Koperasi sehat				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	40.000.000	40.000.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	49.999.810	49.999.810	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Persentase koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	14.999.840	14.999.840	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Persentase pertumbuhan UMKM				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	339.999.290	339.999.290	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase usaha mikro yg naik kelas				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	50.000.000	50.000.000	

			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				Persentase Koperasi aktif dan patuh				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	9.999.880	9.999.880	
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Persentase Koperasi sehat				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	40.000.000	40.000.000	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
				Persentase koperasi yang menerapkan manajemen perkoperasian				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	49.999.810	49.999.810	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				Persentase koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan perlindungan				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				koperasi				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	14.999.840	14.999.840	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Persentase pertumbuhan UMKM				
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	339.999.290	339.999.290	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					
				Persentase usaha mikro yg naik kelas				

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	50.000.000	50.000.000	
17	Peningkatan tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan							
		04. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.						
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
				Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	59.980.000	59.980.000	
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
				Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	7.599.999.250	7.799.999.250	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					
				Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	39.999.600	39.999.600	
18	Peningkatan kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan Kelitbangan Daerah							
		04. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.						
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase implementasi rencana kelitbangan				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	699.999.480	999.999.480	
19	Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah							
		04. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi				
					Dinas Pendidikan	186.460.799.272	181.259.921.294	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.076.409.178	24.076.409.178	

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	11.922.183.298	11.922.183.298	
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	13.853.739.692	13.853.739.692	
					Dinas Lingkungan Hidup	49.796.672.672	49.796.672.672	
					Dinas Perhubungan	13.796.062.646	13.796.062.646	
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	10.758.370.086	10.758.370.086	

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	11.936.132.000	11.936.132.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Persentase PD yang Mengelola Arsip Secara Baku				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	45.999.800	45.999.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	10.494.467.962	10.494.467.962	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan daerah yang tepat waktu				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	2.187.699.040	2.187.699.040	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	512.000.000	530.718.650	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	58.441.285.726	58.946.895.476	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Persentase laporan keuangan OPD yang tertib administrasi				
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	15.545.423.536	15.545.423.536	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Persentase laporan BMD OPD yang tertib administrasi				
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.539.407.760	3.539.407.760	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					

**BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase meningkatnya jumlah pengelolaan penerimaan Pajak				
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.624.282.400	3.814.907.400	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Persentase implementasi rencana kelitbangan				
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	385.060.000	685.060.000	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase penyelenggaraan pengawasan yang optimal				
					Inspektorat	3.330.120.000	3.091.343.000	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase perumusan kebijakan teknis dan pendampingan pengawasan yang terlaksana				
					Inspektorat	1.085.236.000	1.066.919.600	

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		06. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.						
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				Persentase arsip yang terintegrasi dalam sistem				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.999.900	22.999.900	

			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perangkat daerah				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	22.586.222	22.586.222	
				Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi				
					Dinas Perhubungan	9.620.969.254	9.620.969.254	
				Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi				
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.900.000.000	3.900.000.000	
20	Peningkatan Profesionalisme ASN							

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		04. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	35.042.297.438	35.042.297.438	
		05. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien.						
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Persentase Pegawai yang mengikuti diklat sesuai jabatannya				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	1.919.324.200	1.571.324.200	

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Persentase layanan kepegawaian daerah				

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	888.434.750	888.434.750	
21	Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi							
		06. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.						
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
		Persentase anak usia 0-17 kurang 1 hari yang memiliki KIA						
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68.717.997	68.717.997	
		Persentase perekaman KTP Elektronik						
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68.717.997	68.717.997	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
		Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan						

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36.235.450	36.235.450	
22	Pengembangan seni budaya dan olah raga, pemuda dan kewanitaian							
		06. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.						
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Cakupan PUG yang aktif				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	264.981.730	264.981.730	
				Persentase ARG pada APBD				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	264.981.730	264.981.730	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terlayani				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.853.060	54.853.060	

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.853.060	54.853.060	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesenjangan Gender dan Hak Anak				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29.920.240	29.920.240	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Persentase pemenuhan indikator KLA				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	149.938.540	149.938.540	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	109.991.186	109.991.186	
				Persentase Korban Kekerasan Anak Yang Terlayani				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	109.991.186	109.991.186	
23	Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Kota							

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		07. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau						
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan				
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	76.944.340	76.944.340	
24	Perluasan dan Pemerataan Jaringan Air Bersih Skala Lokal dan Regional							
		08. Meningkatnya pelayanan air bersih.						
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Volume tampungan air baku (meter3)				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.312.251.990	42.597.471.500	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Air Minum (%)				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.450.000.000	2.450.000.000	
25	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas sarana prasarana perkotaan							
		04. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.						

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.740.000	49.740.000	
		09. Meningkatnya sarana prasarana perkotaan.						
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	76.786.846.380	101.231.323.754	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				Persentase Bangunan dan Lingkungan Yang Tertata				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.764.753.441	34.717.009.353	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.946.825.706	71.157.293.843	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase pembinaan jasa konstruksi				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.996.880	4.996.880	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	299.983.040	314.158.040	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				jumlah titik daerah potensi dan rawan laka				
					Dinas Perhubungan	6.929.586.304	14.950.363.346	
				Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan				
					Dinas Perhubungan	6.929.586.304	14.950.363.346	

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan				
					Dinas Perhubungan	6.929.586.304	14.950.363.346	
				Titik Kemacetan yang teratasi				
					Dinas Perhubungan	6.929.586.304	14.950.363.346	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					
				Persentase Pemeliharaan Pelabuhan				
					Dinas Perhubungan	70.000.000	70.000.000	

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	299.983.040	314.158.040	
26	Pengendalian Pencemaran Lingkungan							
		07. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau						
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					
				Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau				
					Dinas Lingkungan Hidup	1.360.999.940	1.369.999.940	
		16. Menurunnya pencemaran lingkungan						
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	999.999.520	999.999.520	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	519.925.600	519.925.600	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase penanganan limbah B3				
					Dinas Lingkungan Hidup	126.552.520	126.552.520	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan				
					Dinas Lingkungan Hidup	69.253.600	71.753.600	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				
					Dinas Lingkungan Hidup	338.480.640	338.480.640	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				
					Dinas Lingkungan Hidup	341.515.680	341.515.680	
				Persentase Perusahaan yang mendapatkan minimal level biru				
					Dinas Lingkungan Hidup	341.515.680	341.515.680	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	31.073.360	31.073.360	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase sampah yang dikelola				
					Dinas Lingkungan Hidup	2.366.037.440	4.382.140.702	

			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
					Dinas Lingkungan Hidup	54.996.590	144.736.670	
27	Peningkatan Pengelolaan Persampahan							
		16. Menurunnya pencemaran lingkungan						
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					
				Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.070.061.405	34.984.298.800	
28	Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana							
		17. Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif						
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
				Prosentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
					Badan Penanggulan n Bencana Daerah	285.000.000	485.000.000	
29	Optimalisasi Keamanan, Ketertiban, dan ketenteraman Masyarakat							
		18. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban kota.						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
				Persentase lembaga masyarakat yang aktif				
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	1.588.188.330	1.588.188.330	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
				Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Tarakan Barat				

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kecamatan Tarakan Barat	29.992.660	29.992.660	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				
					Kecamatan Tarakan Tengah	5.000.000	5.000.000	
					Kecamatan Tarakan Barat	5.000.000	5.000.000	
30	Pembangunan dan Pengembangan Sektor Industri							
		14. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah						
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase peningkatan daya saing IKM yang difasilitasi				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	999.993.700	999.993.700	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					
				Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	19.757.900	19.757.900	

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan				
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	109.258.300	109.258.300	
31	Peningkatan prasarana, sarana, utilitas umum kawasan permukiman kumuh							
		11. Menurunnya luas kawasan kumuh.						
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				Persentase lingkungan pemukiman kumuh				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	254.999.860	254.999.860	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan				

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	31.157.753.700	42.967.088.039	
32	Pengembangan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)							
		10. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni baik yang direnovasi maupun yang dibangun untuk MBR						
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	139.999.640	139.999.640	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR				
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	1.000.000.060	1.100.000.060	
33	Peningkatan Kualitas Mitigasi dan Penanggulangan Banjir							
		17. Meningkatnya penanganan kebencanaan yang efektif						
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Persentase Luas Genangan Banjir (%)				

No	Prioritas Prov/ Kab/ Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.421.319.810	42.586.319.810	

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah dalam rangka memenuhi Standart Pelayanan Minimal, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Adapun urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Pada proses perencanaan anggaran perubahan tahun 2023, Pemerintah Perangkat Daerah diberikan kewenangan untuk menentukan kegiatan dan anggaran sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan azas efektif, efisien, kepatutan, kewajaran dan akuntabel serta tanggung jawab yang dituangkan dalam Renja RKPD Perubahan tahun anggaran 2023. Penentuan jumlah alokasi plafon setiap Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan penentuan skala prioritas kegiatan Prioritas dan kegiatan strategis yang telah disusun dalam RKPD Perubahan tahun anggaran 2023. Adapun prosesnya dilakukan dengan cara diskusi intensif secara interaktif antara Perangkat Daerah dan TAPD secara detail, sehingga diperoleh kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 perubahan yang benar-benar akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari proses tersebut, ditetapkan menjadi PPAS sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Selanjutnya penjelasan prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut sebagaimana Lampiran dibawah ini.

**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/ BERTAMBAH
					Dinas Pendidikan	301.606.459.758	331.831.673.888	30.225.214.130
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	146.127.897.513	142.880.509.627	(3.247.387.886)
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.482.042.970	43.220.921.570	3.738.878.600
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	346.850.000	346.850.000	-
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.070	5.999.070	-
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.998.220	69.998.220	-
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.499.790	15.499.790	-
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.958.200	34.958.200	-
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	-
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.150.959	191.445.576	(38.705.383)
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.962.550	289.962.550	160.000.000
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.440.000	14.440.000	-
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1	01	02	2.06	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	4.000.000.000	4.029.870.400	29.870.400
1	01	02	2.06	02	Penambahan Ruang Kelas Baru		200.000.000	200.000.000
1	01	02	2.06	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	350.000.000	400.000.000	50.000.000
1	01	02	2.06	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.100.596.950	2.000.596.950	(100.000.000)
1	01	02	2.06	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	135.297.050	157.502.050	22.205.000
1	01	02	2.06	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	290.965.000	268.760.000	(22.205.000)
1	01	02	2.06	14	Pengadaan Mebel Sekolah	499.500.000	499.500.000	-
1	01	02	2.06	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	175.000.000	175.000.000	-
1	01	02	2.06	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	10.000.000	10.000.000	-
1	01	02	2.06	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	250.000.000	450.000.000	200.000.000
1	01	02	2.06	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.860.000.000	1.860.000.000	-
1	01	02	2.06	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	67.166.200	67.155.600	(10.600)
1	01	02	2.06	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	53.622.140	78.160.340	24.538.200
1	01	02	2.06	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	71.667.600	71.655.000	(12.600)
1	01	02	2.06	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.431.877.010	38.849.278.192	(582.598.818)
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1	01	02	2.06	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	28.195.756.652	57.855.027.160	29.659.270.508
1	01	02	2.06	02	Penambahan Ruang Kelas Baru		100.000.000	100.000.000
1	01	02	2.06	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.528.231.000	1.528.230.000	(1.000)
1	01	02	2.06	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	296.329.000	296.329.000	-

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
1	01	02	2.06	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	618.216.000	618.216.000	-
1	01	02	2.06	06	Pembangunan Laboratorium	2.055.399.000	2.055.399.000	-
1	01	02	2.06	11	Pembangunan Kantin Sekolah	100.000.000	100.000.000	-
1	01	02	2.06	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	486.866.000	486.866.000	-
1	01	02	2.06	25	Pengadaan Mebel Sekolah	539.220.000	539.220.000	-
1	01	02	2.06	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	274.984.630	274.984.630	-
1	01	02	2.06	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.477.836.880	1.477.825.080	(11.800)
1	01	02	2.06	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	67.163.350	49.174.800	(17.988.550)
1	01	02	2.06	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	149.967.280	286.847.400	136.880.120
1	01	02	2.06	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	49.896.090	38.845.490	(11.050.600)
1	01	02	2.06	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	22.598.935.082	22.272.601.400	(326.333.682)
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			-
1	01	02	2.06	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	154.603.400	154.603.400	-
1	01	02	2.06	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	435.584.600	435.584.600	-
1	01	02	2.06	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	100.000.000	100.000.000	-
1	01	02	2.06	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	232.000.000	232.000.000	-
1	01	02	2.06	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.841.122.000	3.891.121.777	49.999.777
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			-
1	01	02	2.06	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	59.921.460	59.921.460	-
1	01	02	2.06	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	49.999.640	49.999.640	-
1	01	02	2.06	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.242.409.972	2.242.294.616	(115.356)
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
1	01	03	2.06	01	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200.530.900	200.530.900	-
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1	01	04	2.06	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	64.995.600	264.988.400	199.992.800
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	01	06	2.06	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	30.000.000	30.000.000	-
					Dinas Kesehatan	157.028.273.596	175.107.082.633	18.078.809.037
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.117.576.290	29.096.523.519	(1.021.052.771)
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.784.788.970	5.721.438.970	(63.350.000)
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
1	02	01	2.06	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	119.700.000	119.700.000	-
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.976.620	4.976.620	-
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.990.070	119.990.070	-
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.740	47.599.440	17.599.700
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.823.600	74.505.760	24.682.160
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
1	02	01	2.06	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.178.605	174.578.852	145.400.247

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	17.000.000	4.000.000
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	609.220.710	609.220.710	-
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	716.400.000	716.400.000	-
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.000.000	10.000.000	-
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	277.762.400	338.950.400	61.188.000
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.348.000	60.165.400	20.817.400
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.735.352.000	2.735.352.000	-
1	02	01	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	-		
1	02	01	2.1	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12.327.391.340	16.124.742.822	3.797.351.482
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	02	02	2.06	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	180.000.000	180.000.000	-
1	02	02	2.06	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.831.537.400	2.026.758.650	195.221.250
1	02	02	2.06	16	Pengadaan Obat, Vaksin	500.000.000	500.000.000	-
1	02	02	2.06	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.716.868.600	1.473.425.600	(243.443.000)
1	02	02	2.06	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	40.000.000	40.000.000	-
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
1	02	02	2.06	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	349.457.344	298.780.064	(50.677.280)
1	02	02	2.06	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	84.135.000	70.800.000	(13.335.000)
1	02	02	2.06	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	198.845.000	100.200.000	(98.645.000)
1	02	02	2.06	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	313.509.660	311.559.660	(1.950.000)
1	02	02	2.06	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	377.000.000	332.600.000	(44.400.000)
1	02	02	2.06	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	61.588.500	55.448.500	(6.140.000)
1	02	02	2.06	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	147.694.920	106.094.920	(41.600.000)
1	02	02	2.06	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	34.999.980	34.999.980	-
1	02	02	2.06	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	49.999.740	293.442.740	243.443.000
1	02	02	2.06	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	40.449.900	36.699.900	(3.750.000)
1	02	02	2.06	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.157.442.000	2.153.412.000	(4.030.000)
1	02	02	2.06	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	184.032.200	190.432.200	6.400.000
1	02	02	2.06	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	311.383.680	304.283.680	(7.100.000)
1	02	02	2.06	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	2.100.000	2.100.000
1	02	02	2.06	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.713.004.290	2.765.246.570	52.242.280
1	02	02	2.06	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	112.546.710	158.707.990	46.161.280
1	02	02	2.06	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	565.559.870	1.057.885.670	492.325.800
1	02	02	2.06	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	165.094.350	293.580.820	128.486.470
1	02	02	2.06	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	308.943.700	205.002.100	(103.941.600)
1	02	02	2.06	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	23.956.000	23.956.000
1	02	02	2.06	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	-	3.750.000	3.750.000
1	02	02	2.06	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	976.043.065	1.238.511.735	262.468.670
1	02	02	2.06	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	10.724.688.320	12.418.974.200	1.694.285.880

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
1	02	02	2.06	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	2.950.000	2.950.000	-
1	02	02	2.06	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	15.000.000	15.000.000	-
1	02	02	2.06	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000	100.000.000	-
1	02	02	2.06	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.639.286.996	1.806.961.996	167.675.000
1	02	02	2.06	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	632.591.670	632.591.670	-
1	02	02	2.06	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	469.163.240	330.236.040	(138.927.200)
1	02	02	2.06	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6.100.000	5.500.000	(600.000)
1	02	02	2.06	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	24.992.660	24.992.660	-
1	02	02	2.06	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	49.531.200	40.506.200	(9.025.000)
1	02	02	2.06	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	22.350.000	17.500.000	(4.850.000)
1	02	02	2.06	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	111.998.455	122.198.455	10.200.000
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	02	02	2.06	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	88.460.000	294.012.060	205.552.060
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-		
1	02	03	2.06	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	34.868.000	34.868.000
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	02	03	2.06	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	903.264.010	796.112.010	(107.152.000)
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-		
1	02	04	2.06	01	Penyediaan dan Pengelolaan Data			

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	101.725.580	101.725.580	-
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-		
1	02	04	2.06	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	150.267.590	150.267.590	-
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	154.760.170	154.760.170	-
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-		
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	02	05	2.06	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.830.420.080	1.726.382.660	(104.037.420)
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	02	05	2.06	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	47.900.000	47.900.000	-
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	02	05	2.06	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	421.340.810	477.595.810	56.255.000

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	-		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.162.507.061	10.156.338.617	993.831.556
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.989.378.000	5.907.578.000	(81.800.000)
1	02	01	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	-		
1	02	01	2.1	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	55.000.000.000	66.538.354.073	11.538.354.073
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	02	02	2.06	05	Pengembangan Rumah Sakit	2.774.953.500	2.774.953.500	-
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-		
1	02	03	2.06	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	200.000.000	200.000.000	-
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	241.356.022.849	324.201.420.886	82.845.398.037
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.254.383.216	9.608.704.838	(645.678.378)
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	907.979.274	907.979.274	-
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
1	03	01	2.06	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta			

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
Pemerintahan dan Program/Kegiatan**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Atribut Kelengkapannya	28.700.000	28.700.000	-
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.991.300	4.991.300	-
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	-
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.992.480	84.240.330	44.247.850
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.999.999	31.999.999	-
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.596.400	97.241.800	47.645.400
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
1	03	01	2.06	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000	50.000.000	-
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000	177.000.000	-
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.700.000	5.700.000	-
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	457.595.960	457.595.960	-
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	25.000.000	25.000.000	-
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.999.930	99.999.930	-
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.870.000	24.870.000	-
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-		
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
1	03	02	2.09	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	3.000.000.000	3.000.000.000	-
1	03	02	2.09	12	Pembangunan Kanal Banjir	22.312.251.990	39.597.471.500	17.285.219.510
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	03	03	2.09	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.450.000.000	2.450.000.000	-
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-		
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	03	04	2.09	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	10.879.468.605	20.793.706.000	9.914.237.395
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	03	05	2.09	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	500.000.000	515.000.000	15.000.000
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-		
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	03	06	2.09	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	3.500.000.000	4.018.320.000	518.320.000
1	03	06	2.09	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	21.360.000.000	27.977.000.000	6.617.000.000
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-		
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-		
1	03	08	2.09	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung	68.498.840	68.498.840	-

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					(TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			
1	03	08	2.09	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	67.604.349.321	92.398.778.695	24.794.429.374
1	03	08	2.09	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	9.113.998.219	10.153.998.219	1.040.000.000
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-		
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	03	09	2.09	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	23.764.753.441	34.717.009.353	10.952.255.912
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-		
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-		
1	03	10	2.09	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000	1.886.700.000	1.786.700.000
1	03	10	2.09	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	-	42.472.200	42.472.200
1	03	10	2.09	05	Pembangunan Jalan	11.784.925.689	12.865.515.280	1.080.589.591
1	03	10	2.09	08	Rekonstruksi Jalan	31.136.817.880	37.048.875.663	5.912.057.783
1	03	10	2.09	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	16.013.283.000	16.587.619.000	574.336.000
1	03	10	2.09	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	2.046.720.200	4.105.630.200	2.058.910.000
1	03	10	2.09	12	Pembangunan Jembatan	3.231.167.185	3.576.167.185	345.000.000
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-		
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-		
1	03	11	2.09	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4.996.880	4.996.880	-
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-		
1	03	12	2.09	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka			

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Pelaksanaan Penataan Ruang	200.000.000	662.655.400	462.655.400
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	03	12	2.09	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	29.999.920	29.999.920	-
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-		
1	03	12	2.09	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	49.983.300	49.983.300	-
1	03	12	2.09	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	19.999.820	19.999.820	-
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	46.420.471.579	63.103.147.716	16.682.676.137
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.097.520.947	5.147.595.569	50.074.622
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400.000.000	388.000.000	(12.000.000)
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-
1	04	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.350.000	14.350.000	-
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			-
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.996.960	3.996.960	-
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.633.312	19.633.312	-
1	04	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.999.050	39.999.050	-
1	04	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.999.650	5.999.650	-
1	04	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.950.800	24.950.800	-
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	-

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	256.000.000	256.000.000	-
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000	50.000.000	-
1	04	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000	250.000.000	-
1	04	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000	9.990.000	-
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			-
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			-
1	04	02	2.09	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	99.999.640	86.889.640	(13.110.000)
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			-
1	04	02	2.09	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	40.000.000	40.000.000	-
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			-
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			-
1	04	03	2.09	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	150.000.000	150.000.000	-
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			-
1	04	03	2.09	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	5.000.000	5.000.000	-
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			-
1	04	03	2.09	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	99.999.860	99.998.331	(1.529)

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			-
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			-
1	04	04	2.09	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	999.999.850	1.049.999.850	50.000.000
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			-
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			-
1	04	05	2.09	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	24.976.300	24.976.300	-
1	04	05	2.09	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	34.325.065.410	48.867.711.399	14.542.645.989
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			-
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			-
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-
2	10	04	2.09	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.990.000	29.972.800	(17.200)
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			-
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-
2	10	05	2.09	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.450.000.000	6.515.084.255	2.065.084.255
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			-
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			-
2	10	10	2.09	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	19.999.800	19.999.800	-
					Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18.856.223.966	19.386.784.513	527.276.196

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.517.712.512	12.979.263.068	461.550.556
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73.116.000	77.196.000	4.080.000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-
1	05	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	121.579.500	130.481.140	8.901.640
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			-
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.485.440	2.485.440	-
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	3.284.351	
1	05	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.995.930	12.995.930	-
1	05	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.924.860	4.924.860	-
1	05	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.994.600	19.994.600	-
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.650.000	156.650.000	-
1	05	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.171.433.000	5.171.433.000	-
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.700.000	6.700.000	-
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	275.000.000	327.744.000	52.744.000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.980.000	14.980.000	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			-
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-
1	05	02	2.09	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	29.979.400	29.979.400	-
1	05	02	2.09	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	19.980.120	19.980.120	-
1	05	02	2.09	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.996.330	4.996.330	-
1	05	02	2.09	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.980.000	4.980.000	-
1	05	02	2.09	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	103.739.165	103.739.165	-
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			-
1	05	02	2.09	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	15.981.100	15.981.100	-
1	05	02	2.09	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	49.994.336	49.994.336	-
1	05	02	2.09	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	99.995.808	99.995.808	-
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			-
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			-
1	05	04	2.09	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	49.980.000	40.980.000	(9.000.000)

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Kabupaten/Kota			
1	05	04	2.09	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	14.945.514	14.945.514	-
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			-
1	05	04	2.09	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3.000.000	3.000.000	-
1	05	04	2.09	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12.804.801	12.804.801	-
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			-
1	05	04	2.09	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	9.988.440	9.988.440	-
1	05	04	2.09	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	18.697.110	18.697.110	-
1	05	04	2.09	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	21.600.000	21.600.000	-
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			-
1	05	04	2.09	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	9.990.000	18.990.000	9.000.000
1	05	04	2.09	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	6.000.000	6.000.000	-
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.804.043.541	5.394.040.764	589.997.223
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.976.330.576	3.166.312.385	189.981.809
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	540.816.000	540.816.000	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	05	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.400.000	8.400.000	-
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.880	9.999.880	-
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.571.243	9.571.243	-
1	05	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.999.720	19.999.720	-
1	05	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.950	14.999.950	-
1	05	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.989.400	19.989.400	-
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	05	01	2.09	05	Pengadaan Mebel	24.924.500	24.924.500	-
1	05	01	2.09	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.847.706	14.847.706	-
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.025.800	145.025.800	-
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000	5.000.000	-
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	270.000.000	270.000.000	-
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	-
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
1	05	03	2.09	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	-
1	05	03	2.09	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi			

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	20.000.000	179.954.380	159.954.380
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1	05	03	2.09	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	98.475.000	(1.525.000)
1	05	03	2.09	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	19.999.860	19.999.600	(260)
1	05	03	2.09	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	49.999.661	49.999.661	-
1	05	03	2.09	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	70.000.000	70.000.000	-
1	05	03	2.09	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	-
1	05	03	2.09	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	19.999.840	19.999.840	-
1	05	03	2.09	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	19.999.880	117.662.380	97.662.500
1	05	03	2.09	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	9.999.980	109.999.980	100.000.000
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	03	2.09	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	19.792.130	19.792.130	-
1	05	03	2.09	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	22.347.730	16.611.380	(5.736.350)
1	05	03	2.09	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	15.000.000	65.000.000	50.000.000
1	05	03	2.09	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	74.757.100	(242.900)
1	05	03	2.09	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	9.999.685	9.902.729	(96.956)
					Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	5.962.151.492	6.192.151.492	230.000.000
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.372.276.787	3.372.276.787	-
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi			

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Pelaksanaan Tugas ASN	54.246.000	54.246.000	-
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1	06	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.750.000	8.750.000	-
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.494.580	2.494.580	-
1	06	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.013.720	33.213.720	1.200.000
1	06	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.002.860	15.002.860	-
1	06	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.997.400	20.997.400	-
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	06	01	2.09	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.337.813	46.337.813	-
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	-
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.900.000	87.400.000	(4.500.000)
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.000.000	3.000.000	-
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.202.676	60.502.676	3.300.000
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	-
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
1	06	02	2.09	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9.956.880	9.956.880	-
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar			

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
1	06	04	2.09	01	Penyediaan Permakanan	29.370.000	29.370.000	-
1	06	04	2.09	02	Penyediaan Sandang	11.000.000	11.000.000	-
1	06	04	2.09	03	Penyediaan Alat Bantu	49.803.900	49.803.900	-
1	06	04	2.09	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	29.979.360	29.979.360	-
1	06	04	2.09	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.984.220	9.984.220	-
1	06	04	2.09	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	14.048.392	14.048.392	-
1	06	04	2.09	12	Pemberian Layanan Rujukan	5.333.000	5.333.000	-
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
1	06	04	2.09	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	39.549.364	39.549.364	-
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	06	05	2.09	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	49.999.795	49.999.795	-
1	06	05	2.09	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	15.499.680	15.499.680	-
1	06	05	2.09	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	19.987.625	19.987.625	-
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
1	06	06	2.09	01	Penyediaan Makanan	50.000.000	50.000.000	-
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
1	06	07	2.09	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	76.944.340	76.944.340	-
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
2	13	04	2.09	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	24.984.770	24.984.770	-
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	2.09	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	159.688.370	159.688.370	-
2	13	05	2.09	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	630.000.000	860.000.000	230.000.000
2	13	05	2.09	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	19.999.960	19.999.960	-
2	13	05	2.09	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000	1.000.000.000	-
					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.402.941.784	7.549.382.076	146.440.292
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.502.713.978	3.502.713.978	-
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.326.000	64.326.000	-
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
2	08	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.050.000	8.050.000	-
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
2	08	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.994.420	19.994.420	-
2	08	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.999.880	4.999.880	-
2	08	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.917.400	20.917.400	-
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
2	08	01	2.09	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.320.988	56.820.988	17.500.000
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	-
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.516.021	71.516.021	-
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.709.000	2.709.000	-
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.784.337	36.784.337	4.000.000
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.263.200	9.153.700	(109.500)
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-		
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-		
2	08	02	2.09	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG	14.981.730	14.981.730	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					termasuk PPRG			
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		
2	08	02	2.09	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	250.000.000	-
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-		
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-		
2	08	03	2.09	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.987.480	39.987.480	-
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	08	03	2.09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.865.580	14.865.220	(360)
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-		
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	08	04	2.09	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9.996.980	9.996.980	-
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	08	04	2.09	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.999.040	9.579.040	(420.000)
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga			

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	08	04	2.09	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.924.220	9.924.220	-
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-		
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-		
2	08	06	2.09	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	34.943.620	34.943.620	-
2	08	06	2.09	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	114.994.920	114.994.580	(340)
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-		
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	08	07	2.09	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	-
2	08	07	2.09	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	74.991.186	74.991.186	-
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-		
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	14	02	2.09	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	9.999.063	9.999.063	-
2	14	02	2.09	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000	64.200.000	-
2	14	02	2.09	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	110.110.160	110.101.740	(8.420)

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	14	02	2.09	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	85.578.720	85.578.720	-
2	14	02	2.09	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	43.796.880	43.796.880	-
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-		
2	14	03	2.09	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	82.500.000	82.500.000	-
2	14	03	2.09	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000	150.000.000	-
2	14	03	2.09	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	52.000.000	52.000.000	-
2	14	03	2.09	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	192.600.000	192.600.000	-
2	14	03	2.09	08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	80.000.000	-
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-		
2	14	03	2.09	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	4.000.000	4.000.000	-
2	14	03	2.09	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	40.000.000	40.000.000	-
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	14	03	2.09	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.000.000	27.000.000	-
2	14	03	2.09	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	392.964.000	518.442.912	125.478.912
2	14	03	2.09	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	644.724.880	644.724.880	-
2	14	03	2.09	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.100.000	17.100.000	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-		
2	14	03	2.09	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000	9.000.000	-
2	14	03	2.09	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	62.000.000	62.000.000	-
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-		
2	14	04	2.09	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	39.988.101	39.988.101	-
2	14	04	2.09	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	360.000.000	-
2	14	04	2.09	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	548.100.000	548.100.000	-
					Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.529.480.117	10.490.820.661	961.340.544
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	-		
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.613.144.416	5.975.272.508	362.128.092
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77.406.000	76.948.500	(457.500)

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
2	09	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.750.000	15.750.000	-
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.330	3.000.330	-
2	09	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.157.250	36.157.250	-
2	09	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.035.660	8.035.660	-
2	09	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.986.800	24.986.800	-
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	600.000	-
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	75.000.000	-
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.000.000	7.000.000	-
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.000.000	99.000.000	-
2	09	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.990.000	14.990.000	-
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-		
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	09	02	2.09	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	10.000.380	10.000.380	-
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-		
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	-		

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2	09	03	2.09	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	24.999.722	24.999.722	-
2	09	03	2.09	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	24.998.310	24.998.310	-
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-		
2	09	03	2.09	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	4.997.750	4.997.750	-
2	09	03	2.09	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	59.999.390	59.999.390	-
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-		
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-		
2	09	04	2.09	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	19.994.000	19.978.000	(16.000)
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-		
2	09	04	2.09	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	-
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	09	05	2.09	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000	3.000.000	-
2	09	05	2.09	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	16.999.000	16.999.000	-
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	-		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-		
3	27	02	2.09	01	Pengawasan Penggunaan Sarana			

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	575.753.076	1.125.753.076	550.000.000
3	27	02	2.09	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	192.128.800	232.118.800	39.990.000
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-		
3	27	02	2.09	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	25.012.500	25.012.500	-
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
3	27	02	2.09	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	2.500.000	2.500.000	-
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-		
3	27	02	2.09	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	2.500.000	2.500.000	-
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-		
3	27	02	2.09	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	105.020.850	105.020.850	-
3	27	02	2.09	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.008.500	5.008.500	-
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-		
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	-		
3	27	03	2.09	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	220.635.730	143.635.730	(77.000.000)
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	-		
3	27	03	2.09	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	831.908.000	928.908.000	97.000.000
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	-		

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-		
3	27	04	2.09	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	5.044.120	5.044.120	-
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-		
3	27	04	2.09	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	4.927.565	4.927.565	-
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
3	27	04	2.09	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	10.000.000	10.000.000	-
3	27	04	2.09	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	243.982.800	243.982.800	-
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-		
3	27	04	2.09	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	5.000.000	4.905.952	(94.048)
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-		
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
3	27	06	2.09	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2.540.000	2.540.000	-
3	27	06	2.09	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	2.520.000	2.520.000	-
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-		
3	27	06	2.09	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	2.522.000	2.522.000	-
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-		
3	27	07	2.09	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	247.408.568	228.208.568	(19.200.000)
3	27	07	2.09	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	885.008.600	893.998.600	8.990.000
					Dinas Lingkungan Hidup	30.403.065.830	33.878.406.796	3.420.338.966
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					LINGKUNGAN HIDUP	-		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.144.904.932	8.144.904.932	-
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.667.309.600	12.663.593.100	(3.716.500)
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
2	11	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.550.000	25.550.000	-
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.898.230	4.898.230	-
2	11	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.748.060	34.522.540	1.638.480
2	11	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.680	32.708.350	7.708.670
2	11	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.373.800	101.755.760	2.172.000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
2	11	01	2.09	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	674.000.175	674.000.175
2	11	01	2.09	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	145.000.000	145.000.000	-
2	11	01	2.09	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.454.860	36.311.504	5.856.644
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	-
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	487.885.418	479.212.348	28.670.890
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	17.811.750	(2.188.250)
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	4.532.448.870	4.724.269.020	191.820.150

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	150.000.000	-
2	11	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.380.000	20.380.000	-
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-		
2	11	02	2.09	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	249.999.880	243.126.480	(6.873.400)
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-		
2	11	03	2.09	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.020	50.000.020	-
2	11	03	2.09	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	25.000.080	72.740.160	47.740.080
2	11	03	2.09	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	54.982.000	96.982.000	42.000.000
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-		
2	11	03	2.09	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	29.999.800	59.999.520	29.999.720
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-		
2	11	03	2.09	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	24.999.640	194.019.855	169.020.215
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-		
2	11	04	2.09	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.610.998.940	2.619.985.770	8.986.830
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	-		

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	-		
2	11	05	2.09	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	31.638.130	29.038.130	(2.600.000)
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	11	06	2.09	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.313.400	19.813.400	2.500.000
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	11	08	2.09	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	84.620.160	84.620.160	-
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-		
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	11	09	2.09	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	85.378.730	85.378.730	-
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-		
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-		

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					(PPLH) Kabupaten/Kota			
2	11	10	2.09	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	7.768.340	7.768.340	-
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	-		
2	11	11	2.09	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	109.489.360	149.489.360	40.000.000
2	11	11	2.09	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	660.723.900	1.423.223.900	707.500.000
2	11	11	2.09	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10.000.000	10.000.000	-
2	11	11	2.09	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	1.476.103.262	1.476.103.262
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.885.859.496	4.698.033.682	(187.825.814)
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.773.268.401	3.801.278.918	28.010.517
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	49.766.000	49.766.000	-
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
2	12	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.150.000	10.150.000	-
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.996.980	1.996.980	-
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	605.995.200	336.768.650	(269.226.550)
2	12	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.999.830	99.998.900	(930)
2	12	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.999.870	29.999.870	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	12	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.648.800	79.247.800	29.599.000
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
2	12	01	2.09	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.209.968	43.209.968	-
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	-
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.936.000	75.936.000	-
2	12	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.650.000	1.650.000	-
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000	5.000.000	-
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.645.000	13.645.000	-
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.640.000	19.640.000	-
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-		
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		
2	12	02	2.09	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	29.266.237	53.456.386	24.190.149
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-		
2	12	02	2.09	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	9.975.000	9.975.000	-
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-		
2	12	02	2.09	03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	9.488.440	9.488.440	-
2	12	02	2.09	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	9.988.440	9.988.440	-
2	12	02	2.09	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	9.999.880	9.999.880	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-		
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		
2	12	04	2.09	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.239.900	11.239.900	-
2	12	04	2.09	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4.995.550	4.995.550	-
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-		
2	12	04	2.09	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20.000.000	19.602.000	(398.000)
					Dinas Perhubungan	23.022.455.676	25.574.316.904	2.371.861.228
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	-		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.614.335.323	6.614.335.323	-
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	286.096.000	286.096.000	-
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
2	15	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.900.000	18.900.000	-
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.590.200	49.590.200	-
2	15	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.986.090	19.986.090	-
2	15	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.612.900	81.612.900	-
2	15	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.983.600	50.283.000	10.299.400
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	15	01	2.09	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.097.094	19.097.094	-
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	15	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	-
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.302.277.645	5.292.277.645	(3.010.000.000)
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.638.920	550.638.920	-
2	15	01	2.09	02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	180.000.000	
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.351.600	39.351.600	-
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-		
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-		
2	15	02	2.09	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.320.850.000	11.342.472.392	5.021.622.392
2	15	02	2.09	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	352.911.400	702.850.836	349.939.436
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-		
2	15	02	2.09	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	59.960.000	59.960.000	-
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		
2	15	02	2.09	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.240.504	50.240.504	-
2	15	02	2.09	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	99.999.400	99.999.400	-
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-		
2	15	02	2.09	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	5.625.000	5.625.000	-
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk			

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	-
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-		
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-		
2	15	03	2.09	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	70.000.000	70.000.000	-
					Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.866.991.707	6.981.387.107	114.395.400
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.900.000.000	3.900.000.000	-
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.476.000	61.926.000	(550.000)
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
2	16	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000	10.500.000	-
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.870	2.999.870	-
2	16	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.999.930	29.999.930	-
2	16	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.940	9.999.940	-
2	16	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.912.800	24.858.200	(54.600)
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
2	16	01	2.09	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	214.974.027	214.974.027	-
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	-
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000	350.000.000	-
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.000.000	220.000.000	-
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	-
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	-
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-		
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	16	02	2.09	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	818.000.000	888.000.000	70.000.000
2	16	02	2.09	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	50.154.480	50.154.480	-
2	16	02	2.09	06	Pelayanan Informasi Publik	29.975.700	29.975.700	-
2	16	02	2.09	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	50.000.000	50.000.000	-
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-		
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	16	03	2.09	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	100.000.000	145.000.000	45.000.000
2	16	03	2.09	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	310.000.000	310.000.000	-
2	16	03	2.09	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	590.000.000	590.000.000	-
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-		
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	20	02	2.09	01	Koordinasi dan Sinkronisasi			

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19.999.840	19.999.840	-
2	20	02	2.09	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	9.999.680	9.999.680	-
2	20	02	2.09	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	9.999.840	9.999.840	-
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	-		
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	21	02	2.09	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.999.900	9.999.900	-
2	21	02	2.09	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.199.700	8.199.700	-
2	21	02	2.09	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6.800.000	6.800.000	-
					Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	6.821.141.223	7.356.884.037	535.742.814
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	-		
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.662.209.422	4.883.658.236	221.448.814
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	142.394.000	142.394.000	-
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
2	17	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	13.300.000	13.300.000	-
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.730	9.999.730	-
2	17	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
						55.999.110	55.999.110	-
2	17	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.710	9.999.710	-
2	17	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.008.600	35.005.800	(2.800)
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
2	17	01	2.09	05	Pengadaan Mebel	75.538.980	75.538.980	-
2	17	01	2.09	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.435.591	79.435.591	-
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	-
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000	210.000.000	-
2	17	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000	70.036.800	65.036.800
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.999.900	29.999.900	-
2	17	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000	345.000.000	95.000.000
2	17	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	-
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-		
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	17	02	2.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.999.940	9.999.940	-
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah	-		

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	02	2.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.265.220	9.265.220	-
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-		
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-		
2	17	03	2.09	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	9.999.880	9.999.880	-
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	-		
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	17	04	2.09	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	-
2	17	04	2.09	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	-
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-		
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	17	05	2.09	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	49.999.810	49.999.810	-
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-		
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	17	06	2.09	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	14.999.840	14.999.840	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-		
2	17	07	2.09	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	74.999.490	-	(74.999.490)
2	17	07	2.09	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	108.999.910	110.799.910	1.800.000
2	17	07	2.09	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	9.999.770	9.999.770	-
2	17	07	2.09	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	549.999.890	549.999.890	-
2	17	07	2.09	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	5.000.000	5.000.000	-
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-		
2	17	08	2.09	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	50.000.000	133.459.490	83.459.490
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	-		
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-		
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	-		
3	30	02	2.09	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	9.997.840	9.997.840	-
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-		
3	30	03	2.09	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	144.000.000	144.000.000
3	30	03	2.09	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9.995.210	9.995.210	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	-		
3	30	03	2.09	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5.000.000	5.000.000	-
3	30	03	2.09	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4.995.000	4.995.000	-
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-		
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-		
3	30	04	2.09	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	29.999.010	29.999.010	-
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	-		
3	30	04	2.09	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9.999.330	9.999.330	-
3	30	04	2.09	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	9.998.200	9.998.200	-
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
3	30	04	2.09	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	999.760	999.760	-
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		
3	30	05	2.09	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	29.999.880	29.999.880	-
3	30	05	2.09	02	Pameran Dagang Nasional	36.000.000	36.000.000	-
3	30	05	2.09	03	Pameran Dagang Lokal	11.008.440	11.008.440	-
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-		

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-		
3	30	06	2.09	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	95.000.000	95.000.000	-
3	30	06	2.09	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	10.000.000	10.000.000	-
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-		
3	30	07	2.09	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	14.999.820	14.999.820	-
3	30	07	2.09	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	14.999.940	14.999.940	-
					Dinas Penanaman Modal dan PTSP	6.598.172.000	6.609.512.237	11.340.237
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	-		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.014.000.000	5.024.547.487	10.547.487
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	136.446.000	119.226.000	(17.220.000)
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
2	18	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.700.000	14.700.000	-
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	10.333.510	8.333.510
2	18	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	144.000.000	144.000.000	-
2	18	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.160.000	3.160.000	-
2	18	01	2.09	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	2.000.000	-
2	18	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	25.000.000	-
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	-		

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Daerah			
2	18	01	2.09	05	Pengadaan Mebel	40.000.000	40.000.000	-
2	18	01	2.09	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	26.000.000	6.000.000
2	18	01	2.09	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.735.500	52.440.101	(1.295.399)
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	-
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.000.000	380.000.000	-
2	18	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.864.500	38.000.000	(1.864.500)
2	18	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.000.000	1.721.739	(1.278.261)
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.500.000	7.500.000	-
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.860.000	63.860.000	-
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.400.000	30.000.000	(4.400.000)
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	18	02	2.09	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	25.000.000	24.987.400	(12.600)
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-		

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	18	04	2.09	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	59.000.000	59.000.000	-
2	18	04	2.09	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	56.000.000	68.480.000	12.480.000
2	18	04	2.09	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	69.105.000	69.105.000	-
2	18	04	2.09	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	15.000.000	15.000.000	-
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	18	05	2.09	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	5.000.000	5.000.000	-
2	18	05	2.09	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	313.967.000	314.017.000	50.000
2	18	05	2.09	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	52.684.000	52.684.000	-
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	-		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	18	06	2.09	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	17.250.000	17.250.000	-
					Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	23.994.576.483	32.065.773.743	8.071.197.260
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-		
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.796.920.710	6.796.920.710	-
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.434.270.813	1.719.114.813	284.844.000
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
2	19	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.650.000	20.650.000	-
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.982.200	1.982.200	-
2	19	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160.093.970	160.093.970	-
2	19	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.510.050	27.510.050	-
2	19	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.935.600	49.935.600	-
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	-
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.025.015.821	1.025.015.821	-
2	19	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.860.000	11.860.000	-
2	19	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.215.830	15.215.830	-
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.800.000	10.800.000	-
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	44.982.480	9.982.480
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	-
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGGAM KEPEMUDAAN	-		
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha	-		

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
2	19	02	2.09	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	9.999.710	9.999.710	-
2	19	02	2.09	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	4.990.460	4.990.460	-
2	19	02	2.09	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	9.998.680	9.998.680	-
2	19	02	2.09	06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	-
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	19	02	2.09	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	-
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	-		
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	-	770.379.997	770.379.997
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	19	03	2.09	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	49.998.850	99.994.750	49.995.900
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-		
2	19	03	2.09	01	Seleksi Atlet Daerah	49.997.480	49.997.480	-
2	19	03	2.09	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	-	1.765.000.000	1.765.000.000
2	19	03	2.09	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	5.000.000	5.000.000	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-		
2	19	03	2.09	01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	19.998.230	19.998.230	-
2	19	03	2.09	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.600.000.000	1.650.000.000	50.000.000
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-		
2	19	03	2.09	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	250.000.000	250.000.000	-
2	19	03	2.09	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	200.000.000	200.000.000	-
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	-		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-		
2	19	04	2.09	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000	150.000.000	-
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	-		
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-		
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	22	02	2.09	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.199.999.610	2.619.999.110	419.999.500
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-		
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	22	03	2.09	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	29.958.280	29.958.280	-
2	22	03	2.09	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	185.000.000	185.000.000	-
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-		
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	22	04	2.09	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	24.989.770	24.989.770	-
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-		
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-		

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	22	05	2.09	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	9.995.870	9.995.870	-
2	22	05	2.09	02	Penetapan Cagar Budaya	54.994.930	54.886.730	(108.200)
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-		
2	22	05	2.09	01	Pelindungan Cagar Budaya	24.947.760	24.947.760	-
2	22	05	2.09	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	49.988.240	49.988.240	-
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-		
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-		
2	22	06	2.09	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	240.000.174	240.000.174	-
2	22	06	2.09	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	25.002.020	25.287.420	285.400
2	22	06	2.09	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	5.403.249.958	9.986.294.668	4.583.044.710
2	22	06	2.09	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	160.000.000	160.000.000	-
2	22	06	2.09	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	200.000.000	200.000.000	-
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	-		
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-		
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-		
3	26	02	2.09	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	50.000.000	57.000.000	7.000.000
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-		
3	26	02	2.09	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	99.997.890	341.997.890	242.000.000
3	26	02	2.09	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.573.049.862	1.462.091.895	(110.957.967)
3	26	02	2.09	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	19.986.270	19.986.270	-
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	-		
3	26	02	2.09	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	19.957.860	19.689.300	(268.560)
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-		

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-		
3	26	03	2.09	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	404.311.750	404.311.750	-
3	26	03	2.09	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	598.624.000	598.624.000	-
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-		
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-		
3	26	05	2.09	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	19.989.600	19.989.600	-
3	26	05	2.09	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	14.998.660	14.998.660	-
3	26	05	2.09	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	274.797.460	274.797.460	-
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-		
3	26	05	2.09	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	49.998.115	49.998.115	-
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.476.747.001	4.476.747.001	-
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-		
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.797.960.550	3.797.960.550	-
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.036.000	42.036.000	-
2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
2	23	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.150.000	10.150.000	-
2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.995.620	2.995.620	-

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.850.000	17.850.000	-
2	23	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.996.920	24.996.920	-
2	23	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.976.555	2.976.555	-
2	23	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.970.800	20.970.800	-
2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
2	23	01	2.09	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.755.830	6.755.830	-
2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	-
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	75.000.000	-
2	23	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.990.000	4.990.000	-
2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000	5.000.000	-
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.996.650	19.996.650	-
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.640.000	14.640.000	-
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	-
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	-		
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	23	02	2.09	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	19.872.324	19.872.324	-
2	23	02	2.09	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.999.440	19.999.440	-
2	23	02	2.09	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	14.999.910	14.999.910	-
2	23	02	2.09	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.982.200	9.982.200	-
2	23	02	2.09	08	Pengembangan Bahan Pustaka			

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
						20.000.000	20.000.000	-
2	23	02	2.09	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	9.995.420	9.995.420	-
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	23	02	2.09	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	94.973.280	94.973.280	-
2	23	02	2.09	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	14.998.820	14.998.820	-
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-		
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	23	03	2.09	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	9.987.580	9.987.580	-
2	23	03	2.09	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	9.996.577	9.996.577	-
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	23	03	2.09	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	5.000.000	5.000.000	-
2	23	03	2.09	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	4.835.440	4.835.440	-
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-		
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	-		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	24	02	2.09	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	24.999.880	24.999.880	-
2	24	02	2.09	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	22.495.440	22.495.440	-
2	24	02	2.09	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	22.999.900	22.999.900	-
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	-		
2	24	02	2.09	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	29.430.200	29.430.200	-
2	24	02	2.09	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	29.983.130	29.983.130	-

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	-		
2	24	03	2.09	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	14.891.200	14.891.200	-
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	-		
2	24	03	2.09	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	14.990.935	14.990.935	-
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	-		
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	-		
2	24	04	2.09	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	19.996.400	19.996.400	-
					Dinas Perikanan	6.647.681.910	7.601.717.224	954.035.314
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	-		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.009.318.280	4.081.451.166	72.132.886
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	109.926.000	133.926.000	24.000.000
3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
3	25	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.850.000	10.850.000	-
3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.300	1.999.300	-
3	25	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.998.430	19.998.430	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
3	25	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.997.370	16.607.057	1.609.687
3	25	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.988.800	24.988.800	-
3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
3	25	01	2.09	05	Pengadaan Mebel	4.932.000	4.709.430	(222.570)
3	25	01	2.09	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.264.500	37.289.191	3.024.691
3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	-
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.000.000	113.162.000	1.162.000
3	25	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.933.350	313.350	(1.620.000)
3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12.500.000	12.500.000	-
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	73.559.170	(1.440.830)
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	-
3	25	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.740.000	14.740.000	-
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-		
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-		
3	25	03	2.09	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	12.254.500	12.254.500	-
3	25	03	2.09	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0	-	-
3	25	03	2.09	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	49.996.250	49.996.250	-
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
3	25	03	2.09	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.278.984.090	1.812.539.970	533.555.880
3	25	03	2.09	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	2.000.000	2.000.000	-
3	25	03	2.09	03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	2.000.000	2.000.000	-
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-		
3	25	04	2.09	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	59.988.480	45.349.080	(14.639.400)
3	25	04	2.09	02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	14.986.844	14.986.844	-
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-		
3	25	04	2.09	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.994.640	14.994.640	-
3	25	04	2.09	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	280.823.600	605.818.910	324.995.310
3	25	04	2.09	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	-
3	25	04	2.09	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	39.958.800	39.958.800	-
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-		
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	-		
3	25	05	2.09	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	7.948.000	7.948.000	-
3	25	05	2.09	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4.990.000	4.990.000	-
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-		
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan			

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-		
3	25	06	2.09	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	349.998.076	349.992.056	(6.020)
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-		
3	25	06	2.09	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.810.600	46.294.280	11.483.680
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.594.026.063	7.093.323.303	(500.702.760)
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	-		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.541.902.332	6.041.902.332	(500.000.000)
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	87.326.000	87.326.000	-
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
2	07	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	16.100.000	16.100.000	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.995.710	19.995.710	-
2	07	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.285.270	30.285.270	-
2	07	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.998.740	9.998.740	-
2	07	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.870.800	19.870.800	-
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
2	07	01	2.09	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	-
2	07	01	2.09	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	17.586.222	24.089.762	6.503.540

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Bangunan Lainnya			
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.000.000	163.000.000	-
2	07	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.300.000	2.300.000	-
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000	5.000.000	-
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.646.915	22.646.915	-
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.944.079	24.944.079	-
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-		
2	07	03	2.09	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	79.999.810	79.999.810	-
2	07	03	2.09	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	99.995.415	99.995.415	-
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-		
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	07	04	2.09	02	Pelayanan antar Kerja	20.492.460	20.492.460	-
2	07	04	2.09	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	16.028.730	16.028.730	-
2	07	04	2.09	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	18.277.280	18.277.280	-
2	07	04	2.09	05	Perluasan Kesempatan Kerja	16.765.800	16.765.800	-
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-		
2	07	04	2.09	03	Job Fair/Bursa Kerja	21.794.660	21.794.660	-
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah	-		

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.09	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	4.895.360	4.895.360	-
2	07	04	2.09	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	4.987.380	4.987.380	-
2	07	04	2.09	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	4.467.460	4.467.460	-
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	07	04	2.09	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.760.000	4.650.000	(110.000)
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-		
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	07	05	2.09	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	16.999.840	16.999.840	-
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-		
2	07	05	2.09	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.999.900	47.999.900	-
2	07	05	2.09	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	42.803.920	42.803.920	-
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	-		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	-		
3	31	02	2.09	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	49.999.840	49.419.800	(580.040)

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
3	31	02	2.09	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	149.998.900	149.998.900	-
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-		
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	-		
3	31	03	2.09	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	3.951.580	3.951.580	-
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-		
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-		
3	31	04	2.09	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	19.999.660	13.483.400	(6.516.260)
3	31	04	2.09	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1.852.000	1.852.000	-
					Sekretariat Daerah	44.684.775.267	50.301.470.066	5.616.694.799
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.927.443.049	16.528.183.049	600.740.000
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102.030.000	128.436.000	26.406.000
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
4	01	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	43.750.000	43.750.000	-
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.989.850	74.989.850	-
4	01	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	408.642.550	374.572.700	(34.069.850)

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
4	01	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	99.999.370	99.999.370	-
4	01	01	2.09	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.000.000	70.000.000	-
4	01	01	2.09	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.349.995.750	3.239.565.630	889.569.880
4	01	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.345.994.000	1.740.569.800	394.575.800
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
4	01	01	2.09	05	Pengadaan Mebel	-	-	-
4	01	01	2.09	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	731.767.882	2.800.003.972	2.068.236.090
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	-
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.715.550.000	1.815.550.000	100.000.000
4	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	379.993.160	706.016.760	326.023.600
4	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.687.720.401	1.691.720.401	4.000.000
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.992.500	79.992.500	30.000.000
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	718.205.357	845.705.357	127.500.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	197.580.000	47.580.000
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	279.052.848	179.052.848
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	200.000.000	-
4	01	01	2.09	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10.000.000	10.000.000	-
4	01	01	2.09	04	Penyediaan Dana Penunjang			

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	600.000.000	-
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	298.931.309	298.931.309	-
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	255.616.966	255.616.966	-
4	01	01	2.09	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	47.550.000	47.550.000	-
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-		
4	01	01	2.09	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	59.999.860	59.999.860	-
4	01	01	2.09	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	207.309.760	222.299.530	14.989.770
4	01	01	2.09	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	82.984.740	82.984.640	(100)
4	01	01	2.09	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	19.986.430	19.977.620	(8.810)
4	01	01	2.09	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5.000.000	5.000.000	-
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-		
4	01	01	2.09	01	Fasilitasi Keprotokolan	99.903.400	149.808.000	49.904.600
4	01	01	2.09	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	249.989.150	339.581.260	89.592.110
4	01	01	2.09	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	422.161.600	809.511.200	387.349.600
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-		
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	-		
4	01	02	2.09	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	69.999.785	69.999.785	-
4	01	02	2.09	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	53.653.340	67.212.740	13.559.400
4	01	02	2.09	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	382.490.775	382.490.775	-
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-		
4	01	02	2.09	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.106.799.900	1.125.999.540	19.199.640
4	01	02	2.09	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	7.229.664.150	7.310.464.150	80.800.000
4	01	02	2.09	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.485.479.850	4.737.704.850	252.225.000

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-		
4	01	02	2.09	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	135.978.900	228.509.200	92.530.300
4	01	02	2.09	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	546.978.600	546.978.600	-
4	01	02	2.09	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	54.330.200	102.721.800	48.391.600
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-		
4	01	02	2.09	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.151.847.013	945.000.000	(206.847.013)
4	01	02	2.09	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5.000.000	5.000.000	-
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-		
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-		
4	01	03	2.09	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	59.999.820	59.999.820	-
4	01	03	2.09	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	49.999.540	82.893.874	32.894.334
4	01	03	2.09	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	449.999.910	449.999.910	-
4	01	03	2.09	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	17.799.430	17.799.430	-
4	01	03	2.09	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4.999.920	4.999.920	-
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-		
4	01	03	2.09	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	19.999.840	19.999.840	-
4	01	03	2.09	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	9.999.860	9.999.860	-
4	01	03	2.09	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5.999.820	5.999.820	-
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-		
4	01	03	2.09	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	23.773.780	23.773.780	-
4	01	03	2.09	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	174.925.180	157.425.180	(17.500.000)
4	01	03	2.09	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	14.999.780	14.999.780	-
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-		
4	01	03	2.09	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10.049.360	10.049.360	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
4	01	03	2.09	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4.999.710	4.999.710	-
4	01	03	2.09	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	94.999.720	94.999.720	-
					Sekretariat DPRD	37.411.304.956	45.035.361.053	7.624.056.097
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.314.742.608	5.314.742.608	-
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.716.000	71.316.000	2.600.000
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
4	02	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.050.000	15.050.000	-
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.985.190	12.549.470	2.564.280
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.525.123	53.360.000	12.834.877
4	02	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.380.110	141.882.520	42.502.410
4	02	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.577.020	121.045.900	23.468.880
4	02	01	2.09	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	149.995.600	149.995.600	-
4	02	01	2.09	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	74.989.260	268.710.910	193.721.650
4	02	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.976.800	135.976.800	-
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
4	02	01	2.09	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.100.000.000	1.100.000.000	-
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000	3.150.000	-
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.000.000	408.000.000	-
4	02	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.840.100	44.529.100	16.689.000

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
4	02	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000	6.000.000	-
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.491.000	22.491.000	-
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.977.270	153.401.270	28.424.000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	75.000.000	25.000.000
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-		
4	02	01	2.09	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	16.041.680.955	16.041.680.955	-
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	45.000.000	49.500.000	4.500.000
4	02	01	2.09	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	90.000.000	90.000.000	-
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-		
4	02	01	2.09	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	428.000.000	535.300.000	107.300.000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-		
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-		
4	02	02	2.09	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	567.889.600	867.727.800	299.838.200
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-		
4	02	02	2.09	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	275.636.000	275.636.000	-
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-		
4	02	02	2.09	02	Pendalaman Tugas DPRD	452.727.400	905.454.800	452.727.400
4	02	02	2.09	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	348.000.000	360.000.000	12.000.000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-		
4	02	02	2.09	03	Pelaksanaan Reses	1.237.500.000	1.874.950.000	637.450.000
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-		

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
4	02	02	2.09	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10.175.474.920	15.937.910.320	5.762.435.400
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	6.997.283.981	7.710.272.885	712.988.904
5	01				PERENCANAAN	-		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.811.103.581	5.063.351.235	252.247.654
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.246.000	54.246.000	-
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
5	01	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.900.000	11.900.000	-
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	-
5	01	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.500.000	59.060.770	(4.439.230)
5	01	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.675.000	9.229.390	(3.445.610)
5	01	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	138.857.800	118.857.800
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
5	01	01	2.09	05	Pengadaan Mebel	10.000.000	10.000.000	-
5	01	01	2.09	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	-
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.700.000	200.000
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.696.000	152.696.000	5.000.000
5	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	30.000.000	10.000.000
5	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.462.000	2.462.000	-
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	-		

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Daerah			
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.600.000	8.600.000	-
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.050.400	57.924.000	24.873.600
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.000.000	29.000.000	-
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.641.000	23.732.200	3.091.200
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-		
5	01	02	2.09	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	943.850.000	943.850.000	-
5	01	02	2.09	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20.000.000	20.000.000	-
5	01	02	2.09	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	-
5	01	02	2.09	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	-
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-		
5	01	02	2.09	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000	15.000.000	-
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-		
5	01	02	2.09	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	15.000.000	15.000.000	-
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-		
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-		
5	01	03	2.09	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,	20.000.000	20.000.000	-

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					RPJMD dan RKPD)			
5	01	03	2.09	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000	50.000.000	-
5	01	03	2.09	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.000.000	90.000.000	-
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-		
5	01	03	2.09	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000	24.368.400	(5.631.600)
5	01	03	2.09	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	2.000.000	2.000.000	-
5	01	03	2.09	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000	24.144.550	(5.855.450)
5	01	03	2.09	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	2.000.000	2.000.000	-
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-		
5	01	03	2.09	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.000.000	48.090.540	18.090.540
5	01	03	2.09	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	2.000.000	2.000.000	-
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-		
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-		
5	05	02	2.09	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	350.000.000	620.000.000	270.000.000
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-		
5	05	02	2.09	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	20.000.000	20.000.000	-

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
5	05	02	2.09	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	15.060.000	45.060.000	30.000.000
					Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	70.127.331.794	64.924.344.808	(5.202.986.986)
5	02				KEUANGAN	-		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.628.460.714	46.088.131.021	(6.540.329.693)
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	907.910.000	959.910.000	52.000.000
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
5	02	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31.500.000	31.500.000	-
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.988.650	19.988.650	-
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.822.449	9.822.449	-
5	02	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	349.997.260	349.997.260	-
5	02	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	374.952.450	412.414.950	37.462.500
5	02	01	2.09	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	49.993.150	97.493.150	47.500.000
5	02	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.648.000	134.335.200	(312.800)
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
5	02	01	2.09	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165.231.763	265.884.228	100.652.465
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	-
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.600.000.000	1.600.000.000	-
5	02	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.008.200	113.008.200	-
5	02	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.065.100.000	1.457.720.000	392.620.000

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000	40.000.000	-
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.988.090	203.715.340	10.727.250
5	02	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	288.035.000	288.035.000	-
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	409.680.000	409.680.000	-
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.970.000	49.970.000	-
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-		
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-		
5	02	02	2.09	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	79.992.670	85.292.670	5.300.000
5	02	02	2.09	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	79.992.670	68.492.670	(11.500.000)
5	02	02	2.09	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	713.399.800	713.399.800	-
5	02	02	2.09	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	713.399.800	713.399.800	-
5	02	02	2.09	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	164.148.240	355.107.960	190.959.720
5	02	02	2.09	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	157.596.600	175.154.000	17.557.400
5	02	02	2.09	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	122.931.680	98.628.880	(24.302.800)
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-		
5	02	02	2.09	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	119.991.800	119.913.800	(78.000)
5	02	02	2.09	05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	49.903.000	49.903.000	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			
5	02	02	2.09	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	49.999.840	49.999.760	(80)
5	02	02	2.09	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	89.975.000	142.835.000	52.860.000
5	02	02	2.09	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	24.992.400	24.992.400	-
5	02	02	2.09	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	99.995.760	161.895.800	61.900.040
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-		
5	02	02	2.09	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	49.982.000	49.982.000	-
5	02	02	2.09	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.999.860	149.999.860	-
5	02	02	2.09	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	99.999.700	99.957.140	(42.560)
5	02	02	2.09	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	37.924.980	37.924.980	-
5	02	02	2.09	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	19.999.640	19.999.640	-
5	02	02	2.09	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	49.999.670	49.999.420	(250)

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
5	02	02	2.09	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	29.999.798	29.999.700	(98)
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		
5	02	02	2.09	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000	5.000.000.000	-
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-		
5	02	03	2.09	01	Penyusunan Standar Harga	349.989.200	252.314.200	(97.675.000)
5	02	03	2.09	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	10.000.000	10.000.000	-
5	02	03	2.09	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	24.989.400	24.989.400	-
5	02	03	2.09	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	29.986.080	29.986.080	-
5	02	03	2.09	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	272.930.400	565.428.400	292.498.000
5	02	03	2.09	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	129.987.000	71.695.000	(58.292.000)
5	02	03	2.09	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	367.985.000	649.557.600	281.572.600
5	02	03	2.09	08	Penilaian Barang Milik Daerah	374.986.080	374.957.080	(29.000)
5	02	03	2.09	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	75.000.000	29.210.100	(45.789.900)
5	02	03	2.09	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	129.986.800	129.970.000	(16.800)
5	02	03	2.09	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	203.840.000	5.060.000	(198.780.000)
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-		
5	02	04	2.09	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	234.013.750	234.006.720	(7.030)
5	02	04	2.09	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	99.999.000	99.999.000	-
5	02	04	2.09	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	343.996.530	343.994.800	(1.730)
5	02	04	2.09	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	142.956.560	142.949.730	(6.830)

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
5	02	04	2.09	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	235.577.200	235.558.200	(19.000)
5	02	04	2.09	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	79.699.980	79.699.980	-
5	02	04	2.09	11	Penagihan Pajak Daerah	459.990.800	690.589.240	230.598.440
5	02	04	2.09	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	79.917.380	79.917.380	-
5	02	04	2.09	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	135.990.000	135.978.170	(11.830)
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	20.578.384.504	18.797.811.617	(1.780.572.887)
5	03				KEPEGAWAIAN	-		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.290.786.017	7.290.786.017	-
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.232.762.702	8.532.762.702	(1.700.000.000)
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
5	03	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.150.000	17.150.000	-
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.991.340	1.991.340	-
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.855.575	50.866.618	31.011.043
5	03	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.024.980	70.606.765	14.581.785
5	03	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.404.740	19.676.215	5.271.475
5	03	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.938.200	39.938.200	-
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	-
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.408.000	59.728.000	(1.680.000)
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN (PPAS-P)**

TAHUN 2023

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.098.000	4.098.000	-
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.989.000	19.989.000	-
5	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.817.000	11.465.000	1.648.000
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-		
5	03	02	2.09	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	29.894.800	29.892.800	(2.000)
5	03	02	2.09	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	310.912.700	310.911.940	(760)
5	03	02	2.09	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	14.962.800	14.962.800	-
5	03	02	2.09	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	19.945.600	19.945.600	-
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	-		
5	03	02	2.09	01	Pengelolaan Mutasi ASN	14.976.800	14.976.800	-
5	03	02	2.09	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	33.128.400	33.128.400	-
5	03	02	2.09	03	Pengelolaan Promosi ASN	299.998.050	563.608.700	263.610.650
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	-		
5	03	02	2.09	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	29.942.000	188.385.200	158.443.200
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-		
5	03	02	2.09	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10.000.000	10.000.000	-
5	03	02	2.09	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	49.683.600	49.683.600	-
5	03	02	2.09	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	50.000.000	50.000.000	-
5	03	02	2.09	07	Pembinaan Disiplin ASN	9.990.000	9.990.000	-
5	03	02	2.09	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15.000.000	24.448.800	9.448.800
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-		

**BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-		
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	-		
5	04	02	2.09	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.919.324.200	1.356.419.120	(562.905.080)
					Inspektorat	7.466.455.675	7.372.696.025	(93.759.650)
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.629.446.825	4.629.446.825	-
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.536.000	54.536.000	-
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
6	01	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.200.000	11.200.000	-
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.973.870	6.054.420	2.080.550
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.995.000	107.995.000	58.000.000
6	01	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.997.200	44.997.200	-
6	01	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.680	14.999.680	-
6	01	01	2.09	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	20.000.000	5.000.000
6	01	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.933.600	126.644.600	76.711.000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.300.000	4.300.000	-
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	70.000.000	-
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	1.500.000	1.500.000	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000	65.000.000	-
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.915.500	32.336.500	(11.579.000)
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.980.000	199.980.000	-
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-		
6	01	02	2.09	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	98.600.000	55.250.000	(43.350.000)
6	01	02	2.09	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	748.000.000	545.700.000	(202.300.000)
6	01	02	2.09	03	Reviu Laporan Kinerja	149.600.000	91.970.000	(57.630.000)
6	01	02	2.09	04	Reviu Laporan Keuangan	172.550.000	345.610.000	173.060.000
6	01	02	2.09	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	149.590.000	150.038.990	448.990
6	01	02	2.09	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	98.600.000	97.750.000	(850.000)
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-		
6	01	02	2.09	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	149.590.000	40.987.500	(108.602.500)
6	01	02	2.09	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	98.530.000	177.325.200	78.795.200
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-		
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-		
6	01	03	2.09	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	48.450.000	41.140.000	(7.310.000)
6	01	03	2.09	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	249.941.400	233.094.600	(16.846.800)
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	-		
6	01	03	2.09	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	49.037.980	9.112.660	(39.925.320)
6	01	03	2.09	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	112.200.000	139.999.660	27.799.660

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
6	01	03	2.09	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	49.838.620	35.327.190	(14.511.430)
6	01	03	2.09	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33.150.000	20.400.000	(12.750.000)
					Kecamatan Tarakan Tengah	13.682.993.639	14.012.892.732	329.899.093
7	01				KECAMATAN	-		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.695.798.917	8.695.798.917	-
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180.816.000	180.816.000	-
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
7	01	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.500.000	24.500.000	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.992.110	17.992.110	-
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.994.570	44.994.570	-
7	01	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.169.760	30.169.760	-
7	01	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.961.400	9.961.400	-
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
7	01	01	2.09	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.703.676	56.566.279	43.862.603
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.780.000	3.780.000	-
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.000.000	305.000.000	-
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.772.760	145.794.760	(23.978.000)
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.999.986	13.999.986	-
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.514.400	44.514.400	20.000.000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	-
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.969.500	12.785.300	2.815.800
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		
7	01	03	2.09	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	39.999.880	39.999.880	-
7	01	03	2.09	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000	750.000.000	-
7	01	03	2.09	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	728.964.390	1.003.163.200	274.198.810
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		
7	01	03	2.09	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.256.400.000	2.256.400.000	-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		
7	01	04	2.09	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.956.330	4.956.330	-
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		
7	01	04	2.09	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	-
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-		

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		
7	01	05	2.09	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	278.699.960	291.699.840	12.999.880
7	01	05	2.09	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	-
					Kecamatan Tarakan Barat	13.673.028.774	13.831.365.421	158.336.647
7	01				KECAMATAN	-		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.101.745.981	9.242.102.628	140.356.647
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	153.238.500	153.238.500	-
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
7	01	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.300.000	27.300.000	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.986.380	4.986.380	-
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.999.090	58.999.090	-
7	01	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.180	24.999.180	-
7	01	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.204.800	10.184.800	(20.000)
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
7	01	01	2.09	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.710.818	60.710.818	-
7	01	01	2.09	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.106.370	10.106.370	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.720.000	257.720.000	5.000.000
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.000.000	87.000.000	-
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.000.000	13.000.000	-
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.575.925	30.575.925	-
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	-
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.270.000	16.270.000	-
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.320.000	7.320.000	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		
7	01	03	2.09	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40.379.060	40.379.060	-
7	01	03	2.09	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	750.000.000	750.000.000	-
7	01	03	2.09	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	299.980.370	299.980.370	-
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		
7	01	03	2.09	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2.420.000.000	2.420.000.000	-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		
7	01	04	2.09	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.992.660	4.992.660	-
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan			

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		
7	01	04	2.09	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	-
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		
7	01	05	2.09	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	216.999.640	229.999.640	13.000.000
7	01	05	2.09	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	-
					Kecamatan Tarakan Timur	15.877.558.415	16.111.041.121	233.482.706
7	01				KECAMATAN	-		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.350.142.335	11.350.142.335	-
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	207.501.000	162.418.500	(45.082.500)
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
7	01	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.300.000	34.300.000	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.992.320	4.989.460	(2.860)
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	199.766.000	199.766.000
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.998.230	66.995.290	(2.940)
7	01	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.400	24.999.400	-
7	01	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.999.400	9.981.132	(18.268)

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.150.000	3.150.000	-
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.000.000	280.823.280	65.823.280
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.288.000	147.288.000	-
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	20.000.000	-
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.823.400	39.823.400	-
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.931.100	23.931.100	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		
7	01	03	2.09	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	44.998.910	44.998.910	-
7	01	03	2.09	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.050.000.000	1.050.000.000	-
7	01	03	2.09	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	419.991.570	419.991.570	-
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		
7	01	03	2.09	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.882.800.000	1.882.800.000	-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		
7	01	04	2.09	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.976.330	4.976.330	-
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan	-		

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Peraturan Kepala Daerah			
7	01	04	2.09	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	35.000.000	35.000.000	-
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		
7	01	05	2.09	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	286.666.420	299.666.414	12.999.994
7	01	05	2.09	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	5.000.000	-
					Kecamatan Tarakan Utara	8.869.786.396	8.894.786.396	25.000.000
7	01				KECAMATAN	-		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.631.946.644	6.631.946.644	-
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.924.000	129.924.000	-
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
7	01	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	18.550.000	18.550.000	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.997.670	32.997.670	-
7	01	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.669.780	13.669.780	-
7	01	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.961.360	9.961.360	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	-
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.215.442	147.215.442	12.000.000

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
7	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.937.400	11.937.400	-
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.000.000	57.000.000	-
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.773.420	10.773.420	-
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.854.830	50.854.830	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		
7	01	03	2.09	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000	20.000.000	-
7	01	03	2.09	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	450.000.000	450.000.000	-
7	01	03	2.09	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	179.967.960	179.967.960	-
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-		
7	01	03	2.09	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	897.500.000	897.500.000	-
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		
7	01	04	2.09	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.988.440	4.988.440	-
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		
7	01	04	2.09	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	15.000.000	15.000.000	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-		
7	01	05	2.09	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	180.999.450	193.999.450	13.000.000
7	01	05	2.09	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	15.000.000	15.000.000	-
					Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.418.140.508	8.958.589.040	540.448.532
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.732.859.995	2.921.115.167	188.255.172
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	58.086.000	58.086.000	-
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-		
8	01	01	2.09	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.650.000	6.650.000	-
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.987.220	2.987.220	-
8	01	01	2.09	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.992.200	1.992.200	-
8	01	01	2.09	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.115.800	16.112.160	(3.640)
8	01	01	2.09	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.688.360	9.688.360	-
8	01	01	2.09	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000	2.500.000	-
8	01	01	2.09	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.920.960	29.920.960	-
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		
8	01	01	2.09	05	Pengadaan Mebel	14.931.040	14.931.040	-
8	01	01	2.09	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	389.700.000	389.700.000	-

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
8	01	01	2.09	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.812.148	29.812.148	-
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	1.800.000	-
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.120.000	65.520.000	9.400.000
8	01	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000	1.000.000	-
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.078.640	5.078.640	-
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000	13.000.000	-
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.960.000	1.960.000	-
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.230.499.865	1.340.113.755	109.613.890
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	29.921.050	51.421.050	21.500.000
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-		
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	-		

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.863.744.400	1.863.744.400	-
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24.999.690	24.999.690	-
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-		
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.550.000.000	1.394.199.040	(155.800.960)
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	19.999.680	106.480.540	86.480.860
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-		
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-		
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi	109.810.320	386.443.160	276.632.840

KODE					URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	SELISIH BERKURANG/
					Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	39.999.990	39.999.990	-
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-		
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	79.999.720	79.999.720	-
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	19.999.680	19.999.680	-
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	74.963.750	79.334.120	4.370.370

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN 2023	SETELAH PERUBAHAN 2023	SELISIH
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	81.292.391.340,0 0	146.487.097.098,00	65.194.705.758,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	81.292.391.340,00	146.487.097.098,00	65.194.705.758,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
6.1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang /Bunga			
	PEMBIAYAAN NETTO	76.292.391.340,0 0	143.487.097.098,00	67.194.705.758,00

BAB VI
P E N U T U P

Demikian Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

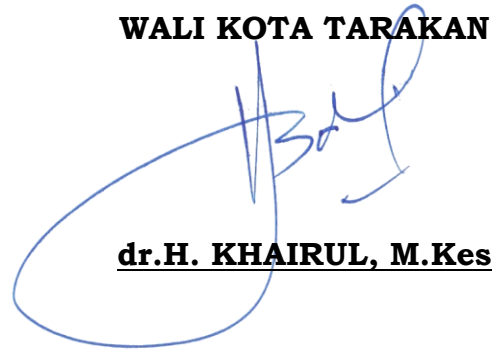
KETUA DPRD



AL RHAZALI

Tarakan, 18 Agustus 2023

WALI KOTA TARAKAN



dr.H. KHAIRUL, M.Kes